**KEBIJAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLAWI TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN WARGA BINAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

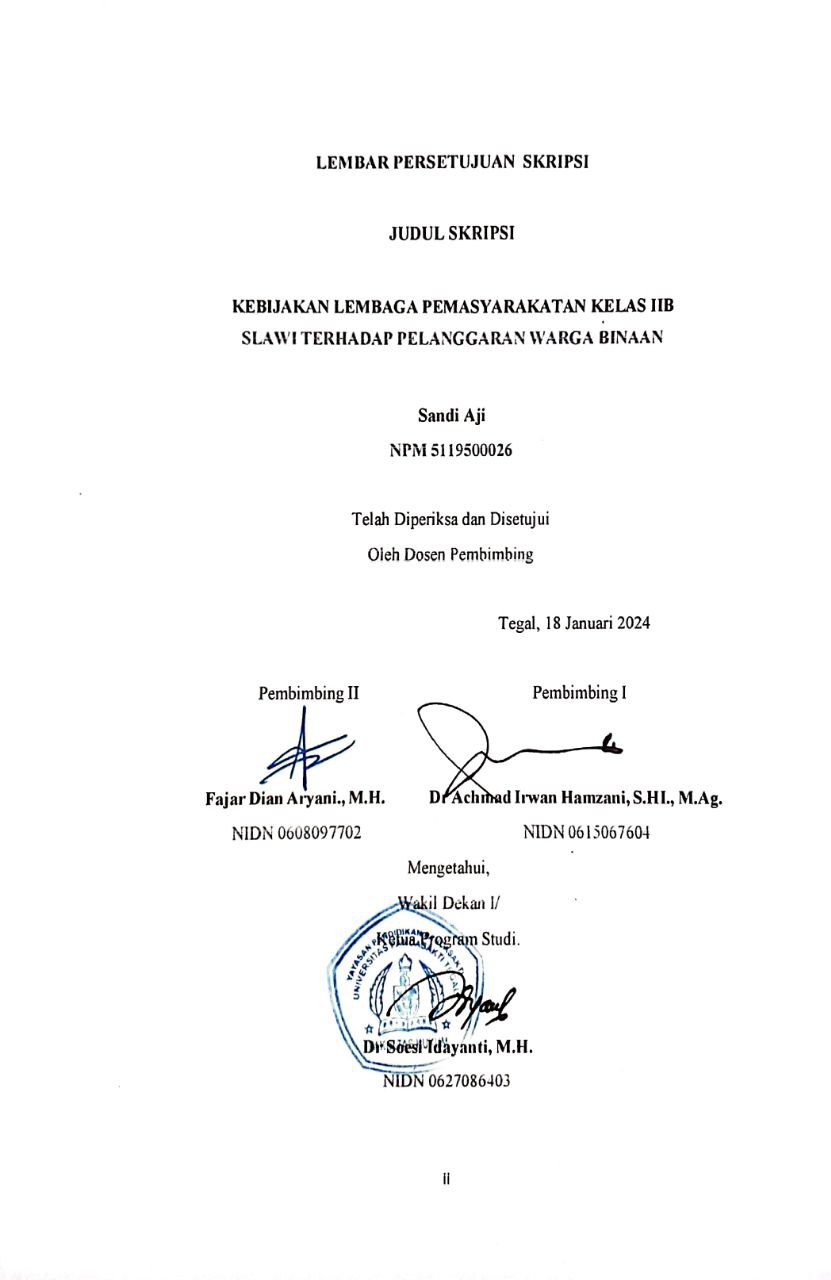
**SANDI AJI**

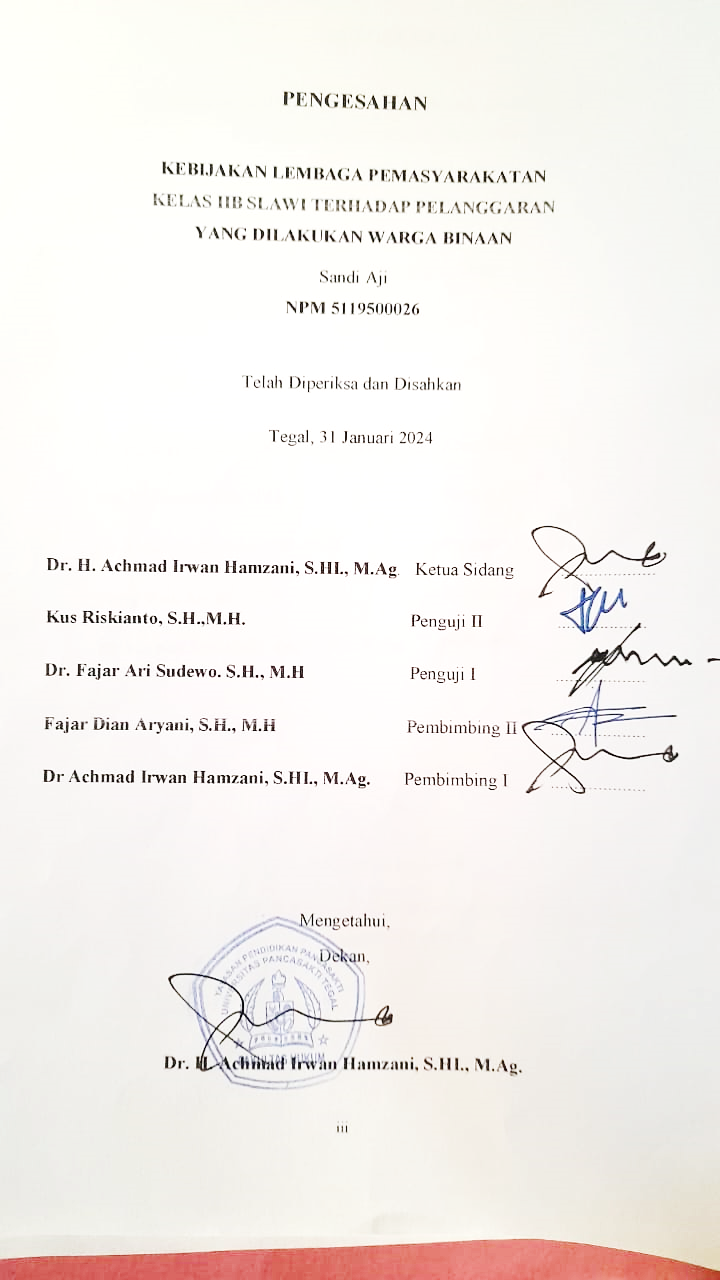
**NPM 5119500026**

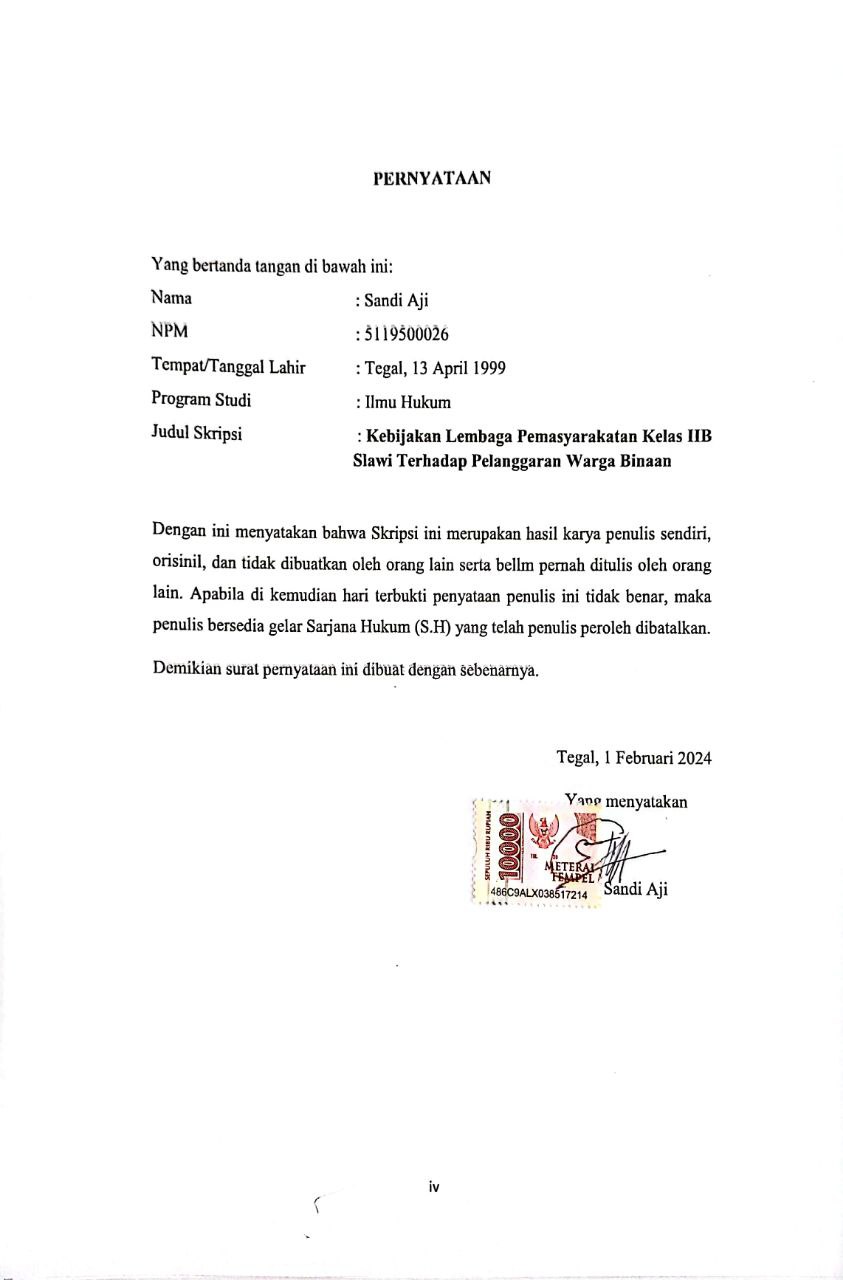
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**



****



**ABSTRAK**

Lembaga pemasyarakatan memegang peranan yang sangat vital untuk mencapai tujuan pembangunan pembinaan yang diterapkan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan membutuhkan sinergi dan partisipasi yang mendalam baik dari petugas dan juga warga binaan pemasyarakatan supaya tujuan pembinaan yang sudah ditetapkan dapat berhasil secara optimal. Sinergi dan partisipasi tersebut dapat berupa aturan-aturan yang harus diimplementasikan oleh petugas dan warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan mengkaji kebijakan dalam menangani pelanggaran warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi.Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi dengan jenis penelitian hukum kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi serta observasi. Teori Miles & Hubernman digunakan penulis sebagai dasar analisis data.Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di lapas adalah pendekatan individu pada warga binaan, melaksanakan pengawasan hunian, program pelatihan bagi warga binaan, memastikan keamaan dan pengawasan. Jenis pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi dari tahun 2022 - 2023 mengalami penurunan. Hukuman yang dikeluarkan oleh lapas untuk pelanggaran tingkat berat adalah membuat surat pernyataan. Pelanggaran tingkat sedang diberikan hukuman penundaan kunjungan. Sedangkan pelanggaran berat aka diberikan hukuman berupa pengasingan dan dipindahkan ke lapas lain yang memiliki keamanan lebih tinggi.Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi berupaya mencegah dan menangani pelanggaran yang terjadi dengan melakukan pembinaan. Program pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi terhadap pelanggaran yang dilakukan warga binaan yakni membatalkan pembebasan bersyarat dan membatalkan proses remisi, memindahakan warga binaan ke lapas yang tingkat pengamanannya lebih tinggi serta menjatuhi hukuman register F.

**Kata kunci : Kebijakan, Pelanggaran, Warga Binaan**

**ABSCRACT**

Correctional institutions play a very vital role in achieving the development goals of development implemented by correctional inmates. The development of inmates requires synergy and deep participation from both officers and correctional inmates so that the training objectives that have been set can be optimally successful. This synergy and participation can take the form of rules that must be implemented by officers and inmates. This research aims to determine efforts and examine policies in dealing with violations by inmates at the Class IIB Slawi Correctional Institution. This research was carried out at the Slawi Class IIB Correctional Institution using the type of library legal research and a statutory approach. The data collection methods used in this research are documentation and observation methods. The author uses Miles & Hubernman's theory as the basis for data analysis. Preventive measures to prevent violations in prisons are an individual approach to inmates, carrying out residential supervision, training programs for inmates, ensuring security and supervision. The types of violations occurring at the Class IIB Slawi Correctional Institution from 2022 - 2023 have decreased. The punishment issued by the prison for serious violations is making a statement. Medium level violations are punishable by suspension of visits. Meanwhile, serious violations will be punished in the form of exile and transfer to another prison with higher security. The Slawi Class IIB Correctional Institution seeks to prevent and handle violations that occur by providing guidance. The coaching program consists of personality development and independence development. The Slawi Class IIB Penitentiary's policy regarding violations committed by inmates is to cancel conditional release and cancel the remission process, transfer inmates to prisons with a higher level of security and sentence them to register F.

***Keywords: Policy, Violations, Inmates***

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi dan bimbingan dalam setiap langkah hidup

2. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Lapas Slawi yang mendukung dan berjuang bersama

3. Almamater Universitas Pancasakti Tegal Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum angkatan 2019

**MOTTO**

*Si vis pacem, para bellum*

(Jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang)

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.

2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal serta Pembimbing I

3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal serta Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.

5. Ibu Selviani, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Uviversitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pegetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Awt. Sebagai amal shalih.

7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.

8. Orang tua serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.

9. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Awt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Awt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 1 Februari 2024

Penulis

**DAFTAR ISI**

[PERSETUJUAN PEMBIMBING](#_Toc88841022) ii

PENGESAHANiii

[PERNYATAAN](#_Toc88841024) iv

[ABSTRAK v](#_Toc88841024)

[PERSEMBAHAN v](#_Toc88841024)ii

[MOTTO v](#_Toc88841024)iii

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc88841024)

[DAFTAR ISI x](#_Toc88841024)i

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc88841025)

[A. Latar Belakang Masalah..................................................................................1](#_Toc88841027)

[B. Rumusan Masalah…………………………………………………………....8](#_Toc88841028)

[C. Tujuan Penelitian…………………………………………………………..…](#_Toc88841029)8

[D. Urgensi Penelitian……………………………………………………….…...8](#_Toc88841030)

[E. Tinjauan Pustaka …………………………………………………………..…9](#_Toc88841030)

[F. Metode Penelitian…………………………………………………………...13](#_Toc88841030)

[G. Sistematika Penulisan](#_Toc88841030)…………………..………………………………......18

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL................................................................…20](#_Toc88841033)

[A. Tinjauan tentang Pengertian Hukum Pidana…………………………….....20](#_Toc88841035)

[B. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana……………………………..........24](#_Toc88841036)

[C. Tinjauan tentang Tujuan Pembinaan Narapidana](#_Toc88841036) ……………………….....33

[D. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan………………………………..40](#_Toc88841036)

[E. Tinjauan tentang Asas-Asas Lembaga Pemasyarakatan……………………45](#_Toc88841036)

[F. Tinjauan tentang Metode Lembaga Pemasyarakatan………………………4](#_Toc88841036)7

[BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51](#_Toc88841043)

[A. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi.........................................51](#_Toc88841027)

[B. Pelaksanaan Kebijakan terhadap Kelas IIB Slawi..........................................61](#_Toc88841027)

[BAB IV PENUTUP 7](#_Toc88841043)4

[A. Simpulan........................................................................................................7](#_Toc88841027)4

[B. Saran...............................................................................................................7](#_Toc88841027)5

[DAFTAR PUSTAKA 7](#_Toc88841065)6

[LAMPIRAN 7](#_Toc88841065)9

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.[[1]](#footnote-1) Narapidana adalah manusia biasa yang karena kesalahannya melanggar hukum oleh hakim dijatuhi pidana.[[2]](#footnote-2) Narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dalam kehidupan bermasyarakat.[[3]](#footnote-3) Pada tahun 2012 Indonesia memiliki 428 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang tersebar di seluruh Indonesia dan pada tahun 2013 akan dioperasikan sebanyak 14 LAPAS dan RUTAN yang baru selesai dibangun untuk mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi. [[4]](#footnote-4)

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Pasal 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat terintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Fungsi pemidanaan menurut Indonesia yang menganut ideologi Pancasila tidak lagi sekadar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pembinaan Sumber Daya Manusia. Salah satu bentuk pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah menciptakan keadaan aman dan kondusif di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sesuai dengan yang tertuang di Pasal 2 huruf (b) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan[[5]](#footnote-5).

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran menjadi aspek utama dalam membimbing dan membina Warga Binaan. Tidak hanya itu baik buruk perubahan sikap yang dimiliki oleh warga binaan sangat dipengaruhi dari Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas keseharian dari warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan harus ada sinergi secara mendalam dan partisipasi, baik warga binaan maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga tujuan pembinaan yang telah ditetapkan berhasil secara optimal. Bentuk sinergi dan partisipasi dapat berupa tata tertib yang harus dipatuhi oleh petugas dan warga binaan pemasyarakatan.

Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara memberikan pedoman dan aturan yang harus diikuti dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Peraturan ini juga mengatur tata cara dan kewajiban narapidana serta larangan yang harus dihindari. Penegakan hukum terhadap warga binaan, Permenkumham No. 6 Tahun 2013 memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan ini melindungi hak-hak narapidana dan memberikan pedoman mengenai perlakuan yang harus diberikan kepada mereka.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, perlu dilakukan upaya antisipasi secara terukur, sistematis dan transparan.

Hukum pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma – norma yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Ketika pidana telah dijatuhkan maka seseorang telah dianggap bersalah melalui proses peradilan pidana dan harus menjalankan hukumannya di lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Hukuman disiplin merupakan bentuk penegakkan disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Dalam penerapan hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan, terlebih dahulu harus mengetahui sejauh mana pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan. Penjatuhan hukuman disiplin diberikan ketika warga binaan pemasyarakatan yang patut diduga terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Setelah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan maka kemudian hukuman disiplin dapat dijatuhkan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Orientasi pelaksanaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur.[[6]](#footnote-6) Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan, petugas hukum selaku Pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan melalui dua jenis pembinaan, yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment. Intramural treatmen*t merupakan pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Pelaksanaan pembinaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemudian jenis pembinaan *ekstramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan warga binaan pemasyarakatan selama dalam Lembaga Pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang menyadari perbuatannya, tidak kembali mengulang perbuatannya, dan dapat menjadi manusia yang utuh belum belum dapat diaplikasikan secara maksimal dengan tepat dan berbeda dari kenyataan idealnya. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya beberapa pelanggaran hingga kejahatan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tidak diketahui secara luas bahkan oleh para petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan khususnya Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi, masih sering ditemukan pelanggaran - pelanggaran hingga kejahatan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yakni berupa terjadinya perkelahian, percobaan pelarian, tindakan kriminal, penyelundupan narkoba, bahkan melawan petugas lapas. Kekerasan antar sesama warga binaan ini lebih sering dialami oleh warga binaan yang baru masuk. Warga binaan baru ini sering diminta uang ataupun barang secara paksa yang berujung pada tindakan kekerasan, karena menolak memberikannya.

Pelanggaran dan kejahatan yang masih banyak dilakukan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dapat mencederai proses hukum yang sedang dijalani oleh warga binaan pemasyarakatan tersebut dan sudah melanggar hak-hak yang terdapat pada diri warga binaan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya tempat yang diperuntukan bagi warga pembinaan masyarakat agar dapat dibina justru menjadi tempat kejahatan. Persoalan kekerasan antar sesama warga binaan ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan masalah lama yang sering diberitakan di media massa, dan tentunya menjadi keluhan sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Kekerasan yang dilakukan sesama warga binaan akan mencederai proses hukum dan melanggar hak-hak yang melekat pada diri warga binaan.

Narapidana adalah subjek yang wajib didik sebagaimana dengan peraturan yang ada. Petugas Lembaga Pemasyarakatan/ sipir berperan penting untuk membuat para warga binaan pemasyarakatan memiliki rasa aman di dalam Lapas dengan memantau dan membina para warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh para petugas. Petugas harus selalu memantau, mengendalikan, dan mendidik narapidana. Agar tidak dianggap wajar dan biasa, hendaknya pelanggaran yang terjadi antar sesama warga binaan dapat ditindak lanjuti dan dipikirkan bersama. Usaha atau upaya-upaya untuk menemukan inti permasalahan belum dilakukan secara maksimal, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan binaan terus saja terjadi, tidak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi ?

2. Bagaimanakah kebijakan Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Slawi terhadap pelanggaran yang dilakukan warga binaan ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi.

2. Untuk mengkaji kebijakan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Slawi terhadap pelanggaran yang dilakukan warga binaan.

**D. Urgensi Penelitian**

Urgensi penelitian ini yakni pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang menyadari perbuatannya, tidak kembali mengulang perbuatannya, dan dapat menjadi manusia yang utuh di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi. Serta diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat dalam mengoptimalkan penanggulangan kejahatan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

**E. Tinjauan Pustaka**

1. Rugun Romaida Hutabarat melakukan penelitian mengenai problematika lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan terpadu menyatakan bahwa problematika over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan menjadi implikasi sistem pemidanaan yang memprimadonakan pidana penjara pada hukum materiil. Sistem pemidanaan/sistem peradilan pidana terpadu belum terintegrasi ide-ide pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan, baik dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Masalah over kapasitas di seluruh lapas Indonesia terjadi pada hampir di semua kanwil. Hal demikian yang menunjukkan adanya kecenderungan penjatuhan pidana penjara. [[7]](#footnote-7)

Penulis akan meneliti mengenai apa saja pelanggaran yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi oleh warga binaannya dan meliputi kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu adalah penulis melakukan analisis pelanggaran yang terjadi dan kebijakan yang muncul tentunya kebijakan yang muncul terintegrasi dengan aturan dan ide – ide pemasyarakatan. Sedangkan peneliti terdahulu hanya fokus terhadap over kapasitas pemindahan narapidana belum disesuaikan dengan ide-ide pemasyarakatan.

2. Penelitian oleh Muhammad Isfannoury dan Ainal Hadi yang meneliti mengenai penerapan sanksi terhadap Narapidana dan Tahanan yang melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Rumah Tahanan dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan. Pelanggaran tata tertib yang terjadi di Rutan kelas IIB Bireuen seperti tidak mengikuti program pembinaan, merusak fasilitas rutan, pelanggaran sedang membawa dan menggunakan HP. Faktor penyebabnya adalah over kapasitas, kurangnya petugas keamanan, dan kurangnya kegiatan pengisi waktu luang sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Rumah Tahanan belum memberikan efek yang maksimal. Dibuktikan dari masih banyak terjadinya pelanggaran keamanan di tahun-tahun terakhir[[8]](#footnote-8).

Perbedaan penelitian yang dilakukan antara peneliti terdahulu dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peneliti akan melakukan mengidentifikasi upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, sedangkan yang dilakukan oleh Muhammad Isfannoury dan Ainal Hadi menitikberatkan pada pelanggaran apa saja yang terjadi di rumah tahanan.

3. Andrie Mahendra Kurniawan melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dan yang paling dominan ialah kasus penyelundupan barang-barang terlarang seperti handphone, narkotika, dan senjata tajam. Berbicara mengenai pelanggaran yang dilakukan tahanan maupun narapidana, penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum harus dilakukan dengan adil, tanpa pilih kasih dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, bukannya dilaksanakan dengan tindakan yang dan tidak manusiawi[[9]](#footnote-9). Penegakan hukum yang tidak sesuai inilah yang sering menimbulkan permasalahan baru dalam sistem pemasyarakatan, contohnya adalah perlakuan sewenang-wenang dari petugas yang bahkan menyebabkan tewasnya tahanan dan narapidana sehingga memicu terjadinya kerusuhan dan pemberontakan hingga pembakaran yang dilakukan para warga binaan pemasyarakatan.

Persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dan penelitian milik Andrie Mahendra adalah membahas mengenai tema yang sama yaitu kasus pelanggaran yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada penegakkan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum sedangkan penulis tidak hanya berfokus pada penegakkan hukum saja melainkan upaya yang dilakukan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

4. Ahmad Sanusi melakukan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dan mendapatkan hasil bahwa berdasarkan data jumlah pegawai dan warga binaan tidak rational (4: 1) artinya 4 orang pegawai melayani 1 warga binaan pemasyarakatan.[[10]](#footnote-10) Berdasarkan fakta di atas, maka konsep reintegrasi sosial pada lembaga pemasyarakatan terbuka belum berjalan optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terutama pasal 9 ayat (2) yang memberikan kejelasan wewenang antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan terbuka dalam melaksanakan program pembinaan lanjutan tahap kedua/asimilasi pada Lapas Terbuka. Penelitian yang akan dilakukan sejalan dengan penelitian terdahulu milik Ahmad Sanusi yakni berfokus pada evaluasi pembinaan pada lembaga pemasyarakatan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Pettanasse tentang pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan menyatakan bahwa Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan menurut Indonesia yang menganut ideologi Pancasila tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan.[[11]](#footnote-11)  Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis karena membahas mengenai pembinaan warga binaan dalam sistem pemasyarakatan.

**F. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum kepustakaan berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. [[12]](#footnote-12)

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).[[13]](#footnote-13) Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum.[[14]](#footnote-14) Suatu penelitian kepustakaan tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini berupa :

1) Data Primer, yaitu “data yang diperoleh langsung dari responden penelitian melalui wawancara dan kuesioner di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi”.

2) Data Sekunder, yaitu “data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi seperti data yang diperoleh dari situs-situs internet dan data lainnya yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti”.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku - buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk pada suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan dokumentasi. Metode observasi diartikan sebagai bentuk pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena lapangan yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia, seperti yang terjadi di dalam kenyataan. Dengan observasi, peneliti dapat memperoleh data yang spesifik dan gambaran yang lebih jelas. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Slawi.

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari hasil observasi.[[15]](#footnote-15)

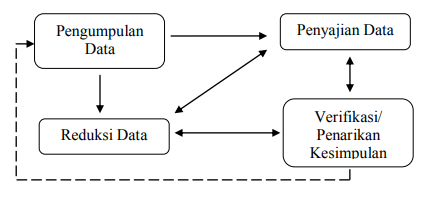
5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif menurut Miles & Huberman yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[[16]](#footnote-16)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas.

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumulan informasi tersusun yang memeri kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid yang meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Perancangan tersebut dilakukan guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesmpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis.

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfirgurasi yang utuh. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

**G. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini ditulis dengan sistematis bab demi bab guna mengetahui isi dari penulisan skripsi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub- sub yang saling berkaitan serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang berupa pemaparan tentang segala hal yang diuraikan dalam penulisan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini berguna memberikan gambaran umum serta berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**

Merupakan bab yang menguraikan beberapa pengertian melalui bahan- bahan dan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang akan dibahas selanjutnya.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini mendeskripsikan upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani pelanggaran serta mengkaji kebijakan terhadap pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi.

**BAB IV PENUTUP**

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.

# **BAB II**

# **TINJAUAN KONSEPTUAL**

# **Tinjauan tentang Pengertian Hukum Pidana**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang bersifat negara kesejahteraan, sebagaimana tercermin dalam tujuan nasional pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, darah dan keturunan, peningkatan kesejahteraan umum, yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat dan turut serta mewujudkan ketertiban dunia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui tata kelola dan kepemimpinan yang baik. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui penegakan hukum dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan tujuan bersama.[[17]](#footnote-17)

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Legislasi terjadi dalam tatanan sosial yang dikenal sebagai masyarakat. Pameo Ubi Societas Ibi Ius menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum harus siap menghadapi serangkaian perubahan yang terus berkembang (*Law in the Making*). [[18]](#footnote-18)

"Penegakan hukum" disebut "hukum" dalam bahasa Inggris. Yang dimaksud dengan “penegakan” adalah perbuatan menetapkan sesuatu seperti undang-undang sebagai akibat hukum. mendakwa; melaksanakan perintah dan tugas; Mullady berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan supremasi hukum dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang mendasarinya. Aparat penegak hukum perlu memahami hakikat hukum (makna hukum) yang mendasari tindakan hukum tersebut mengacu pada dinamika yang terjadi pada proses pembuatan undang-undang.[[19]](#footnote-19)

Hukum mengikuti perkembangan masyarakat, dan hukum tidak pernah mendahului perkembangan masyarakat. Dengan kata lain, hukum hanya tunduk pada tinjauan ke belakang. Hukum mempunyai satu tujuan yakni menciptakan tatanan sosial yang tertib dalam masyarakat. Hukum pidana menitikberatkan pada pengaturan permasalahan pidana dalam masyarakat. Hukum pidana memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “penjaga Konstitusi”. Oleh karena itu, hukum pidana mengenai tindak pidana dapat dikatakan sebagai pengawas yang bertugas memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.[[20]](#footnote-20)

Undang-undang adalah alat yang diatur oleh lembaga-lembaga yang berkuasa dan digunakan untuk mengendalikan perilaku sehari-hari orang-orang dalam masyarakat. Konsep-konsep teori sosial tidak tunduk pada kontrol yang ketat atau longgar, dan hukum pada dasarnya adalah alat kontrol. Instrumen kontrol yang sah bergantung pada sifat dan bentuk politiknya, serta apakah masyarakat menyukainya dan bersedia tunduk padanya. Undang-undang disahkan, ditegakkan, dan mereka yang dicurigai tidak mematuhinya diancam dengan sanksi.[[21]](#footnote-21)

Pompe menjelaskan bahwa ``Hukum pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang menentukan tindakan apa yang harus dihukum dan dalam bentuk apa tindakan tersebut dilakukan. ''Hukum pidana tentu diperlukan karena berfungsi sebagai upaya preventif yang bersifat umum dan khusus bagi masyarakat. Hukuman adalah rasa sakit atau penderitaan yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi adalah akibat hukum yang dijatuhkan kepada orang yang terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan dengan melakukan suatu perbuatan hukum atau menghasut suatu perkara hukum.[[22]](#footnote-22)

Sanksi memegang peranan yang sangat penting dalam suatu norma hukum bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu penentu kepatuhan sosial. Semakin kuat sifat hukuman dan koersif suatu sanksi, semakin efektif nilainya dalam memaksimalkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Semakin masyarakat menaati aturan hukum, maka semakin baik pula cara hidup yang diatur secara hukum. Sanksi yang efektif akan menjamin penerapan hukum secara signifikan di masyarakat.

Aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Langkah-langkah yang masih relevan dipertimbangkan dan dilakukan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak puas dengan rasa keadilannya. Keadilan adalah tujuan hukum, nilai kunci hukum, dan nilai kunci hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bertujuan untuk mencapai keadilan baik bagi individu maupun masyarakat, yang disebut keadilan sosial. Tujuan undang-undang adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat umum. Hukum harus mampu mengakomodasi unsur keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang harus dimiliki suatu undang-undang, terutama dalam hal pendokumentasian norma hukum. Apeldoorn menjelaskan, ada dua aspek dalam kepastian hukum. Aspek pertama menyangkut pembentukan hukum yang sebenarnya. Siapa pun yang menginginkan keadilan ingin mengetahui hukum dalam suatu kasus tertentu sebelum persidangan dimulai. Kedua, jaminan kepastian hukum, yaitu perlindungan para pihak dari kesewenang-wenangan peradilan.[[23]](#footnote-23)

Soerjono Soekanto proses penegakan aturan ditimbulkan pada lima faktor yakni faktor hukum atau peraturan Perundang – Undangan, faktor aparat penegak hukumnya, yaitu para orang yg terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan, terkait tentang duduk perkara cara berpikir yang berkaitan dengan persoalan cara berpikir, faktor prasarana yang membantu proses penegakan hukum, faktor rakyat, yaitu kawasan hukum itu berlaku atau ditegakkan, faktor budaya, yaitu akibat karya, cipta serta rasa yang didasarkan pada karsa insan pada pada kehidupan warga .[[24]](#footnote-24)

# **Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana**

Pembinaan berasal dari istilah “bersinar-sinar” yang ialah membangun, mendirikan, mengusahakan supaya memiliki kemajuan lebih. Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses pemugaran atau sistem dan cara merubah sesuatu ke arah yg lebih baik serta bermakna. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 wacana pelatihan warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “pembinaan adalah kegiatan untuk menaikkan kualitas ketaqwaan kepada ilahi yang Maha Esa, Narapidana serta siswa Pemasyarakatan.[[25]](#footnote-25)

Pembinaan itu mampu berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan berasal suatu tujuan dan pembinaan itu pula mampu membagikan pada perbaikan atas sesuatu. pelatihan memiliki korelasi yang erat menggunakan famili terutama terhadap korelasi orang tua serta anak buat dididik itu memiliki kemampuan buat melakukan tugas:[[26]](#footnote-26)

* 1. Memberikan pembinaan mental atau spiritual dengan baik
  2. Sanggup memenuhi keperluan finansialnya sebagai biaya pendidikan
  3. Sanggup memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya.

Pembinaan adalah seseorang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni tetapi dipraktekkan tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Tujuan pembinaan terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude, dan kecakapan maupun skill.

Pembinaan ialah suatu proses melepaskan hal-hal yg dimiliki serta mengkaji hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang menjalaninya serta melatih pengetahuan dan baru buat mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Melalui pembinaan, individu dapat mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi, baik yang berasal dari eksternal maupun internal. Mereka memperoleh pemahaman komprehensif tentang aspek positif dan negatif dari situasi mereka dan mengeksplorasi potensi penyelesaiannya. Coaching memiliki kekuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi, menginspirasi individu untuk menerapkan strategi yang paling efektif untuk mencapai aspirasi pribadi dan profesional mereka. Selain itu, pembinaan memfasilitasi pengembangan dan perolehan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil mencapai tujuan dan sasaran hidup.

Mangunhardjana mengungkapkan bahwa apabila berjalan baik, pembinaan dapat membantu orang yang menjalaninya untuk :

1. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya
2. Menganalisis situasi hidup dari segala segi positif dan negatifnya
3. Menemukan masalah hidup
4. Menemukan hal atau bidang hidup yang sebaiknya diubah dan diperbaiki
5. Merencanakan sasaran dan program di bidang hidup sesudah mengikuti pembinaan.

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai melontarkan gagasan merubah tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Gagasan Saharjo dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana sebagai berikut:[[27]](#footnote-27)

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sistem pembinaan pembinaan narapidana meliputi berbagai komponen antara lain Pembina, penerima pembinaan, materi pembinaan, lokasi pembinaan, fasilitas pembinaan, dan beberapa unsur lainnya. Narapidana berperan sebagai penerima dan penerima manfaat dari proses pembinaan. Tujuan pengembangan narapidana lebih dari sekedar pertumbuhan mental dan spiritual, mencakup peningkatan kemandirian serta menawarkan kesempatan kerja di lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem sosial dapat dibagi menjadi dua komponen utama: perlakuan intramural dan perlakuan ekstramural. Perawatan intramural melibatkan pelaksanaan sesi pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan seseorang dengan Tuhan, serta meningkatkan kemampuan intelektual, sikap, perilaku, dan kesejahteraan fisik dan spiritual secara keseluruhan. Pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, yang disebut dengan perlakuan ekstramural, berfokus pada peningkatan dan pembinaan keterampilan narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan. Hal ini termasuk memfasilitasi asimilasi, memberikan kesempatan untuk mengunjungi keluarga, memberikan cuti pra-pelepasan, dan mendukung pembebasan bersyarat.

Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang dipenjara, yang mencakup berbagai kegiatan termasuk pendidikan, pengajaran agama, serta keterlibatan dalam olahraga dan kegiatan seni. Aspek pendidikan dari inisiatif ini ada dua: pendidikan formal, yang mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan pendidikan non-formal, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan individu, antara lain mencakup kursus dan pelatihan keterampilan. Tujuan utama dari kerangka pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kecakapan intelektual dan kemampuan kognitif mereka yang berada dalam sistem pemasyarakatan.

Pembinaan yang diberikan kepada anak di lembaga pemasyarakatan harus berpegang pada prinsip-prinsip pembinaan yang dituangkan dalam protokol yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:[[28]](#footnote-28)

* 1. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.[[29]](#footnote-29)
  2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya (non diskriminasi)
  3. Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
  4. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.
  5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
  6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hakhak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya, tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
  7. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan,proses, dan metode[[30]](#footnote-30)

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
2. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
3. Sebagai metode berarti cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan. Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, psikis, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang berguna[[31]](#footnote-31)

Pembinaan kemandirian manusia tidak lepas dari sikap spiritual, oleh karena itu narapidana dan narapidana diberikan kegiatan keagamaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan para warga binaan serta menyadarkan mereka akan akibat perbuatannya. Kegiatan olah raga dan kesenian dilakukan agar narapidana dan warga binaan tidak bosan dengan harapan dapat memulihkan kelelahan dan memberikan rasa memiliki. Kegiatan ini dilakukan pada waktu senggang atau sepulang kerja.

Pekerjaan narapidana dalam konsep pemasyarakatan adalah:

1. Narapidana diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat
2. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan darinya
3. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan jabatan atau negara.
4. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional
5. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila
6. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan tidak terbelakang.
7. Perlu diusahakan agar narapidana mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya disamping mendapat didikan berangsur-angsur mendapat upah untuk pekerjaannya.

Perjalanan perbaikan masih panjang, dan untuk memenuhi tugasnya dalam mengubah kondisi sosial, salah satu syaratnya adalah profesionalisme pejabat..

Pegawai yang profesional harus mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan tugasnya, kemampuan beradaptasi dengan situasi tanpa mengubah tujuan yang telah disepakati, kemampuan bekerja sama dengan siapapun, mempunyai integritas moral yang baik dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Petugas pengadilan harus mengacu pada Pasal 8 UU No. 8. 12/1995, bahwa petugas penjara adalah aparat kepolisian aktif yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan, pengamanan, dan pengawasan narapidana. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah orang-orang yang bekerja di lembaga peradilan harus bersih, pegawai yang bersih dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

# **C. Tinjauan tentang Tujuan Pembinaan Narapidana**

Perkembangan narapidana erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Pendidikan narapidana saat ini awalnya bermula dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan sudah tidak sesuai lagi dengan pembentukan nilai-nilai dan fitrah yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana Indonesia dimulai pada tahun 1964, ketika Sahardjo menyatakan dalam konferensi penjara bahwa mereka yang mendapat status penjara tidak lagi ditakuti, tetapi kemudian dilatih untuk dilahirkan kembali ke masyarakat.[[32]](#footnote-32)

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:[[33]](#footnote-33)

Pasal 2 :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 3 :

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan pasal 2 dan 3 UU pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima di dalam masyarakat.

Sudarto pada umumnya tujuan pembinaan dapat dibedakan sebagai berikut:[[34]](#footnote-34) 1. Pembalasan / retribusi: Pembalasan sebagai tujuan pidana atau pemidanaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori absolute. Menurut penganut paham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai hukuman, timbulnya bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap narapidana serta bangunan fisik yang didirikan dan dipergunakan untuk menampung para narapidana yang kemudian dikenal dengan nama bangunan penjara. Adapun fungsi dari bangunan penjara tersebut sebagai tempat atau wadah pelaksanaan untuk memperlakukan narapidana sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan penjara tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mendukung sistem perlakuan terhadap narapidana.

Salah satu masalah utama dalam pembaharuan hukum pidana adalah mengenai masalah pemidanaan. Mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia, maka harus dipikirkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yakni yang mendasarkan diri atas keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan mana yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.[[35]](#footnote-35)

Sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap introspeksi dan motivasi. Tahap introspeksi dimaksudkan agar narapidana mengenal diri sendiri. Hanya dengan cara mengenal diri sendiri seseorang bisa merubah dirinya sendiri. Sedangkan tahap motivasi adalah kelanjutan dari introspeksi. Narapidana diberikan teknik memotivasi, baik memotivasi diri sendiri maupun orang lain.

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari ketidaksesuaian pemidanaan dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Harsono menawarkan tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran, untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri. Cara mencapai kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana yaitu melalui beberapa tahap :

* 1. Mengenal diri sendiri Dalam tahap mengenal diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah mengenai hal hal positif dan negatif dalam diri sendiri, mengenal hal paling mendasar terkait hubungannya dengan Tuhan, manusia serta hubungannya dengan masyarakat.
  2. Memiliki kesadaran beragama Kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Mampu mewujudkankesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.
  3. Mengenal potensi diri Narapidana diajak mampu mengenal potensi diri sendiri serta mengembangkan potensi yang dimilikinya tersebut. Mengenal nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai yang negatif. Mereka juga memperluas cara pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk maju, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta berusaha mengembangkan sumber daya manusia yaitu potensi diri sendiri.
  4. Mengenal cara memotivasi Mengenal cara memotivasi adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, kearah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berpikir, bertingkah laku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang. Selalu memotivasi diri sendiri untuk tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah yang tak akan terulang.
  5. Mampu memotivasi orang lain Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya. Untuk selalu berpikir positif, tidak mudah putus asa, memiliki harga diri dan selalu berusaha untuk maju, mampu mengembangkan diri sendiri, sumber daya manusia dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  6. Memiliki kesadaran yang tinggi Memiliki kesadaran baik untuk dirinya sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara. Kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  7. Mampu berpikir dan bertindak Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berpikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusan yang dia pilih. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dengan mengembangkan diri sendiri dan kepercayaan diri.
  8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat Narapidana yang telah mengenal diri sendiri diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi. Dengan cara berpikir yang positif dengan membuat perencanaan hidup, dengan selalu memotivasi diri dengan mengembangkan potensi dan sumber daya pribadi.
  9. Memiliki tanggung jawab Mengenal diri sendiri juga sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berpikir, mengambil keputusan dan bertindak , maka narapidana juga harus mampu bertanggung jawab atas keputusannya tersebut. Tanggung jawab untuk tetap konsekuen terhadap langkah yang telah diambil, mampu menerima segala resiko yang timbul akibat dari tindakannya tersebut.
  10. Menjadi pribadi yang utuh Pada tahap terakhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya. Menjadi manusia yang berkonsekuen, berkepribadian, bertanggung jawab, berorientasi ke depan dan selalu ingin maju dengan cara berpikir yang positif.

Tujuan pembinaan yang diperhatikan yaitu kesadaran, nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri. Kesadaran dapat dicapai jika narapidana telah mengenal diri sendiri.

# **Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.[[36]](#footnote-36)

Lembaga pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulunya dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang orang telah dijatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara terpadu pembina,yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”[[37]](#footnote-37)

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yaitu :[[38]](#footnote-38)

* 1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
  2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
  3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
  4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi hukuman pidana
  5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
  6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
  7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.
  8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
  9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang ia alami.
  10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.[[39]](#footnote-39)

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat disebut narapidana atau warga binaan, atau yang masih berstatus narapidana, yakni yang masih dalam proses persidangan dan belum diputuskan bersalah atau tidak bersalah oleh hakim. Di penjara, petugas yang terlibat dalam pembinaan narapidana dan narapidana disebut petugas penjara atau dulunya sipir penjara.

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga penjara sebagai bagian terakhir dari sistem peradilan pidana. Penjara merupakan tempat berinteraksi dengan seseorang, yang input dan outputnya adalah orang-orang yang dicap sebagai penjahat. Penjara sebagai tempat penanganan orang tidak mempunyai hak untuk memilih orang-orang yang masuk ke dalamnya. Hal ini yang membedakan Lapas dengan lembaga lain, seperti perusahaan, universitas, atau organisasi masyarakat, yang dapat menyeleksi masukannya terlebih dahulu.

Lembaga ini mempertimbangkan karakteristik pelanggar yang berbeda-beda, baik berdasarkan gender maupun lintas ras. Oleh karena itu, para pejabat juga harus mewakili kualitas-kualitas yang berbeda ini. Petugas yang berdedikasi dan antusias diperlukan untuk menerapkan sistem pemasyarakatan yang efektif. Karier perbaikan menawarkan kesempatan untuk menyampaikan perasaan kepedulian kepada orang lain melalui tindakan positif.

Fasilitas lembaga pemasyarakatan mempunyai sarana dan prasarana fisik yang memadai untuk melaksanakan pembinaan narapidana, seperti ruang kantor, fasilitas perawatan, tempat ibadah, fasilitas olah raga berupa lapangan, fasilitas sosial seperti tempat kunjungan keluarga, ruang pertemuan dan konsultasi. kamar, kendaraan.

# **Tinjauan tentang Asas-asas Lembaga Pemasyarakatan**

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbing, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan tersebut, penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah :

* 1. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.[[40]](#footnote-40)

* 1. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non diskriminasi)

* 1. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.

* 1. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

* 1. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara

* 1. Terjaminnya hak berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu

Upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga. Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, phisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.[[41]](#footnote-41)

# **Tinjauan tentang Metode Lembaga Pemasyarakatan**

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terhukum (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara.Seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, maka akan dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya.[[42]](#footnote-42)

Masalah yang timbul dari sistem kepenjaraan membuat sistem kepenjaraan yang diterapkan dirasa kurang ampuh sebagai alat atau sarana untuk pengurangan kejahatan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap politik kriminal itu sendiri. Kekurangan yang ada sistem kepenjaraan diganti dengan sistem pemasyarakatan yang juga merupakan tujuan dari pidana penjara.

Sistem pemasyarakatan saat ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pembinaannya, dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaniah, pribadi, serta kemasyarakatan. Selain itu dalam penyelenggaraannya mengikut sertakan secara langsung hubungan dengan masyarakat.[[43]](#footnote-43)

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang “*Treatment of Offenders*”, yang *multilateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.[[44]](#footnote-44)

Konsep pemasyarakatan disempurnakan dengan memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagai arah tujuan pidana penjara dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina. Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah: [[45]](#footnote-45)

* 1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
  2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
  3. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
  4. Negara tidak mempunyai hak untuk menjadikan narapidana lebih buruk atau lebih buruk daripada sebelum masuk penjara;
  5. Selama hilangnya kebebasan bergerak, narapidana harus diperkenalkan ke dalam masyarakat, tidak boleh dipisahkan dari masyarakat.
  6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh memakan waktu atau hanya untuk kepentingan lembaga atau negara, pekerjaan yang diberikan harus untuk pembangunan negara;
  7. Kepemimpinan dan pendidikan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila;
  8. Setiap orang adalah pribadi dan harus diperlakukan sebagai pribadi, meskipun ia melakukan kesalahan. Narapidana tidak boleh diberitahu bahwa mereka adalah penjahat;
  9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
  10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Surat Edaran Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilakukan melalui 4 tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu: [[46]](#footnote-46)

1. Tahap pertama

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal perihal dirinya termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman kerja, korban, serta petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

2. Tahap Kedua

Jika narapidana yang bersangkutan telah dididik 1/3 dari hukuman sebenarnya dan, menurut pendapat otoritas penjara, telah terjadi kemajuan yang cukup, termasuk bukti kesadaran, pengembangan, disiplin dan pelaksanaan hukuman. Sesuai aturan lembaga, narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan tingkat menengah.

3. Tahap ketiga

Apabila proses pembinaan tahanan telah menyelesaikan ½ masa hukuman sebenarnya dan menurut pendapat lembaga pembinaan tahanan telah cukup berkembang baik secara fisik, mental, maupun keterampilan, maka forum meningkatkan perkembangan. memungkinkan terjadinya asimilasi di luar masyarakat.

4. Tahap keempat

Apabila proses verifikasi menyelesaikan 2/3 dari hukuman sebenarnya atau dipersingkat 9 bulan, maka narapidana yang bersangkutan dapat dibebaskan dan usulan pembebasan bersyarat diputuskan oleh dewan komisi penjara.

1. Sitanggung, D., Fakhriah, E. L., & Suseno, S. (2018). Perlakukan Terhadap Narapidana Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 102-110. DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0106.102-110 [↑](#footnote-ref-1)
2. Razi, M., & Mokhtar, K. A. (2020). The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh. *Jurnal Media Hukum*, 27(2), 195-216. DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.20200151 [↑](#footnote-ref-2)
3. Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditarma, Bandung, 2006, h 87. [↑](#footnote-ref-3)
4. Harahap. M.I.R., Ramadhani.W, Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan. *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology* (IJCLC). 3(1), 28-34. DOI: https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12728 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 2 huruf (b) UU No. 22 Tahun 2022 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wulandari, Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan, 9, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2, 131-142. DOI: http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v9i2.303 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hutabarat. R.R, Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu, 1, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1, 42-50. DOI:10.24912/jmishumsen.v1i1.333 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Isfannoury dan Ainal Hadi, *Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana dan Tahanan yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib,* 2, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2020, 4, 217-225 [↑](#footnote-ref-8)
9. Andrie Mahendra Kurniawan, *Penegakkan Hukum terhadap Tahanan yang Melakukan Pelanggaran Hukum,* 2016 : Fakultas Hukum [↑](#footnote-ref-9)
10. Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,* 2, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019, 12, 123-138. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ismail Pettanase, *Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*, 6, Jurnal Hukum Tri Pantang, 2020, 1, 5-14. DOI: https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.215 [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), hlm.52. [↑](#footnote-ref-12)
13. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana. 2008) h. 29. [↑](#footnote-ref-13)
14. Peter Machmud. 2011: 93 [↑](#footnote-ref-14)
15. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 206 [↑](#footnote-ref-15)
16. Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-16)
17. Agus Triono, Ombdusman, *Penegakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Bandar Lampung*, Universitas Lampung, 2017, Hlm. 213. [↑](#footnote-ref-17)
18. Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, 4(2), 2017: 149. DOI: https://doi.org/10.35586/.v4i2.244 [↑](#footnote-ref-18)
19. Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017, Hlm. 150. DOI: https://doi.org/10.35586/.v4i2.244 [↑](#footnote-ref-19)
20. Safarudin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *UBELAJ*, Volume 4 Number 1, April 2019, Hlm. 37. DOI:10.33369/ubelaj.v4i1.7303 [↑](#footnote-ref-20)
21. Soetandyo Wignjosoebroto*, Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hlm. 87. [↑](#footnote-ref-21)
22. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hlm. 88. [↑](#footnote-ref-22)
23. C. Asser & Paul Scholten*, Penuntutan Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1993. [↑](#footnote-ref-23)
24. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, Hlm 4-5. [↑](#footnote-ref-24)
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) [↑](#footnote-ref-25)
26. Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.30 [↑](#footnote-ref-26)
27. A. Josias Simon R. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. (Bandung : Lubuk Agung,2017) h.12 [↑](#footnote-ref-27)
28. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [↑](#footnote-ref-28)
29. A Josis Simon dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Lubuk Agung, 2020, h.1 [↑](#footnote-ref-29)
30. Romli Atmasasmita, Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan, Bandung: Rineka Cipta. 2016. h.12 [↑](#footnote-ref-30)
31. Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta : Pradnya [↑](#footnote-ref-31)
32. Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung: Alumni, 2017, h.86 [↑](#footnote-ref-32)
33. Pasal 2 dan 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [↑](#footnote-ref-33)
34. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 2016, Hlm. 24 [↑](#footnote-ref-34)
35. Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2017, h. 61 [↑](#footnote-ref-35)
36. Serikat putra jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Semarang : Undip. 2015.h.38 [↑](#footnote-ref-36)
37. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan [↑](#footnote-ref-37)
38. Suwarto, Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2017, Volume 25 No.2 [↑](#footnote-ref-38)
39. A. Josias Simon R. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : Lubuk Agung, 2018. [↑](#footnote-ref-39)
40. A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010, hal.1. [↑](#footnote-ref-40)
41. Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 19822, hlm.13. [↑](#footnote-ref-41)
42. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: CV. Armico, 1988, hlm. 41 [↑](#footnote-ref-42)
43. R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Binacipta, 2013, hlm. 23-24 [↑](#footnote-ref-43)
44. R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita, 2013, Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, Binacipta, Bandung, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-44)
45. Dwidja Priyatno, Op., Cit, hlm. 97-99. [↑](#footnote-ref-45)
46. R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita, Op., Cit, hlm. 23-24 [↑](#footnote-ref-46)